

TANGGAP PETANI GUREM DI DESA MISKIN KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN

(Peasant farmers' response to the agriculture technology innovation in poor village of Temanggung District)

Abdul Choliq, Agus Hermawan, dan Forita D. A

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah

ABSTRACT

During new order period, priority was given to the hi-tech industry sector and less favorable to the agricultural sector. Many researchers pointed out that the previous policy as the main cause of the current big numbers of peasant farmers. Poor farmers responded to the innovation differently. The response was affected by several factors. To find out the response, deeper assessment was carried out from August to October 2004 in Temanggung District. Peasant farmers, coming from the medium and high land, were interviewed using structural questionnaire. Aside of primary data, secondary data was gathered from related institutions. Research showed that high land peasant farmers were more passive than medium land farmers. High land farmers had less ability on capital improvement, risk-averse to the new program, discouraged to change farming practices, and their expertise improvement effort was less than those of medium land farmers. Factors affecting were low education attainment and less infrastructure supports (i.e. transportation, information, formal banking institution). Up to the end of the new order period, *KUT/Kredit Usahatani* (Farming Credit) was the only source of formal credit for farmers. Along with the Banking regulation, KUT was changed to *KKP/Kredit Ketahanan Pangan* (Food Security Credit). However, the new scheme credit was not fully responded either.

Keywords : *peasant farmers', poor village, technology innovation*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Jawa Tengah, walaupun selama 10 tahun terakhir kontribusinya pada PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) mengalami penurunan rata-rata 0,82% per tahun. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB pada tahun 2003 adalah sebesar 19,74%. Penyerapan tenaga kerja relatif tinggi pada tahun 2003 yakni 46,15% (BPS, 2004a), walaupun dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan dengan laju rata-rata 4,02% per tahun.

Adanya krisis ekonomi, terpaksa

pemerintah mengambil kebijakan sebagai pemenuhan tuntutan lembaga donor IMF, yang seringkali tidak berpihak pada rakyat kecil khususnya petani. Pencabutan subsidi pupuk dan liberalisasi perdagangan berakibat biaya usahatani meningkat dan tidak diimbangi dengan harga jualnya. Membanjirnya produk pertanian impor dan pembatasan peran Bulog yang tidak lagi sebagai stabilitor harga gabah, menyebabkan posisi petani semakin terjepit dan akhirnya produktivitasnya menurun sehingga kemiskinan semakin meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan

pada tahun 1996 jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah 6,4 jt (21,61%), meningkat menjadi 8,8 jt (28,46%) pada tahun 1999. Adanya berbagai upaya pemerintah rakyat miskin dapat dikurangi 6,98 jt (21,78%) pada tahun 2003 (BPS, 2004b). Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi B DPRD Jateng memberikan peringatan "Jateng Rawan Busung Lapar", untuk itu perlu kerjasama antara dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan (Suara Merdeka, 2 Juni 2005).

Upaya untuk meningkatkan produksi demi memperkuat ketahanan pangan dapat dilakukan dengan pembukaan lahan baru dan intensifikasi (Suryana, 2003). Namun pembukaan lahan baru di Jawa Tengah sangat sulit, karena kepemilikan lahan petani rata-rata < 0,5 ha, biasa disebut petani gurem (BPS, 2004c). Luas rata-rata pemilikan tanah per kapita di Jawa dan Madura pada tahun 1951 hanya 0,162 hektar (Suhendar, 1995). Menurut Mubyarto (2002) konsep agribisnis pada kondisi tersebut sulit dikembangkan. Keadaan tersebut jangan terlalu ditakutkan, karena suatu saat akan tercapai optimasi skala usaha sesuai dengan penguasaan lahannya (Dawe, 2000 *dalam* Sudana *et al*, 2002). Oleh karena itu inovasi teknologi pertanian sangat dibutuhkan dalam rangka mengintensifkan lahan yang ada, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani (Oxfam, 2000).

Berbagai inovasi teknologi pertanian telah banyak dilakukan pemerintah melalui instansi terkait tak terkecuali di daerah miskin. Namun demikian kondisi di lahan kering (medium dan tinggi) yang banyak dihuni masyarakat miskin, tidak sebaik di lahan irigasi. Selain produktivitasnya rendah, masyarakatnya terbatas mendapatkan penghasilan serta akses keluar juga terbatas. Akibatnya petani dalam menyikapi suatu inovasi teknologi sangat

beragam. Tulisan ini mengungkap bagaimana tanggap petani gurem yang ada di desa miskin (dataran medium dan tinggi) di kabupaten Temanggung terhadap inovasi teknologi pertanian.

BAHAN DAN METODA

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 2004 di Kabupaten Temanggung, khususnya di wilayah dataran medium dan tinggi. Desa Kebumen dan Pagergunung, kecamatan Pringsurat dipilih untuk mewakili desa di dataran medium (300 – 700 m dpl), sedangkan yang mewakili desa di dataran tinggi (>700 m dpl) dipilih desa Getas, kecamatan Kaloran, dan desa Canggal, kecamatan Kledung.

Pengumpulan dan Analisis data

Pengumpulan data sekunder melalui laporan BPS, dinas terkait, kantor kecamatan, dan desa. Data dan informasi primer diperoleh melalui survei yaitu wawancara terhadap responden dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap pemuka masyarakat dan petani responden berjumlah 39 petani di dataran medium dan 52 petani di dataran tinggi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Karakteristik petani responden

Karakteristik petani responden tercantum pada Tabel 1. Secara umum umur petani di dataran medium dan di dataran tinggi tidak banyak berbeda. Umur responden di dataran medium rata-rata 43,92 tahun, sedangkan responden di dataran tinggi rata-rata 42,40 tahun. Sebagian besar pendidikan formal

responden hanya lulusan SD, baik di dataran tinggi (54%) maupun di dataran medium (51,3%). Hal yang sama pada keikutsertaan dalam pendidikan non formal, responden di dataran tinggi yang tidak pernah mengikuti pendidikan non formal jauh lebih banyak (80,6%) bila dibandingkan dengan di dataran medium (55,9%). Terdapat perbedaan jenis latihan yang pernah diikuti, responden di dataran tinggi mengikuti latihan pada bidang pertanian (16,7%), sedangkan di dataran medium di bidang non pertanian (23,5%).

Tabel 1. Karakteristik petani responden

	<i>Dataran Medium</i>	<i>Dataran Tinggi</i>
Umur (th)	43.92	42.40
Pengalaman aktif dalam usahatani (th)	20.25	22.33
Tingkat pendidikan formal (%)		
1. tidak sekolah/tidak lulus SD	5.1	26.0
2. lulus SD	51.3	54.0
3. SMP	28.2	14.0
4. SMA	15.4	6.0
5. PT	0.0	0.0
Tingkat pendidikan informal: (%)		
1 tidak pernah	55.9	80.6
2 kursus/latihan non pertanian	23.5	2.8
3 kursus/latihan pertanian	14.7	16.7
4 kursus agribisnis (budidaya-pemasaran)	5.9	0.0
N (jumlah responden)	39	52

Respon petani gurem

Respon petani gurem terhadap kesediaan berpartisipasi dalam suatu program yang ditawarkan memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara petani gurem di dataran medium dengan di dataran tinggi. Data Tabel 2 menunjukkan bahwa petani di dataran tinggi cenderung lebih pasif. Untuk meningkatkan modal usahatani yang lebih banyak, cenderung tidak memiliki kemampuan. Petani di dataran

tinggi cenderung takut menghadapi risiko bila melakukan suatu program yang tidak biasa dikerjakan, hal ini terbukti dari keberanian mengubah jenis usahatannya sangat rendah. Keadaan yang hampir berlawanan diperlihatkan pada petani di dataran medium. Untuk meningkatkan modal usahatani lebih siap dan tergolong lebih berani menanggung risiko, serta ketersediaan mengubah jenis usahatannya relatif lebih besar.

Tabel 2. Kesiadaan berpartisipasi dalam program upaya intensifikasi usahatani dengan prasyarat tertentu

<i>Prasyarat</i>	<i>Dataran medium</i>	<i>Dataran tinggi</i>
	——— persen ———	
Curahan tenaga kerja usahatani lebih banyak	76,3	74,5
Modal usahatani lebih banyak	73,5	47,5
Penerapan teknologi lebih rumit	62,5	62,5
Risiko usahatani lebih tinggi	71,9	55,6
Mengubah jenis usahatani	50,0	39,4

Kebutuhan keahlian

Kebutuhan keahlian yang diperlukan petani gurem dalam rangka program pengembangan usaha agribisnis beberapa jenis kegiatan dipaparkan pada Tabel 3. Pada tabel tersebut tercermin sikap petani di dataran medium rata-rata lebih tinggi dibanding dengan petani di dataran tinggi dalam merespon kebutuhan keahlian. Cara pengadaan sarana produksi, pengorganisasian kelompok tani, pengolahan hasil, pemasaran dan cara mendapatkan kredit, petani di dataran medium lebih unggul dibanding dengan petani di dataran tinggi.

Tabel 3. Kebutuhan keahlian pada program pengembangan usaha agribisnis

<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Dataran medium</i>	<i>Dataran tinggi</i>
	——— persen ———	
Cara pengadaan sarana produksi	86,7	75,7
Pengorganisasian dan peningkatan kemampuan kelompok tani.	81,5	76,5
Pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan.	79,2	63,3
Cara pemasaran hasil pertanian dan produk olahan.	80,0	65,7
Cara mendapatkan kredit usahatani dan usaha kecil.	76,7	74,2

Sumber modal yang digunakan

Sumber modal yang digunakan untuk usahatani, selain dengan modal sendiri juga memanfaatkan pinjaman pada lembaga formal maupun non formal. Ketergantungan petani di dataran tinggi terhadap pinjaman untuk modal usahatannya cukup tinggi. Beberapa sumber pinjaman yang diandalkan untuk modal usahatani tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Sumber kredit untuk modal usahatani

<i>Sumber modal</i>	<i>Dataran medium</i>		<i>Dataran Tinggi</i>	
	% petani	Besar pinjaman (Rp)	% petani	Besar pinjaman
Tetangga	2,6	2.500.000	7,7	1.000.000-3.600.000
Saudara	2,6	300.000	5,8	200.000- 2.000.000
Kelompok tani	2,6	500.000	3,8	500.000
Kas Desa	0,0	-	3,8	100.000
Bank	12,8	500.000-20.000.000	9,6	100.000-1.500.000

Keaktifan anggota kelompok

Keaktifan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok tani baik di dataran medium maupun di dataran tinggi cukup tinggi. Jenis kegiatan kelompok tani yang berdampak langsung terhadap kegiatan usahatani dan diikuti anggotanya tercantum pada Tabel 5. Kegiatan penyuluhan pertanian mendominasi kegiatan anggota kelompok tani yakni 70,6% petani di dataran medium dan 71,9% petani di dataran tinggi. Sambatan dalam usahatani menduduki peringkat ke dua dalam keaktifan anggota kelompok tani (17,6% di dataran medium dan 12,5% di dataran tinggi).

Tabel 5. Keaktifan anggota kelompok tani dalam kegiatan yang mempunyai dampak langsung terhadap kegiatan usahatani

<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Dataran medium</i>	<i>Dataran tinggi</i>
	———— persen ————	
Penyuluhan pertanian	70,6	71,9
Arisan/simpan pinjam	0	6,3
Gotong royong/ <i>sambatan</i> dalam usahatani	17,6	12,5
Membina kerukunan warga	5,9	0
Lainnya	5,9	9,4

Kegiatan Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah yang diamati cenderung kurang dirasakan manfaatnya bagi petani baik di dataran medium maupun di dataran tinggi. Jenis kegiatan KUD yang bermanfaat langsung pada kegiatan usahatani tercantum pada Tabel 6. Penilaian terhadap jenis kegiatan yang berkaitan langsung pada kegiatan usahatani antara petani di dataran medium dengan

petani di dataran tinggi memperlihatkan persentase yang berbeda. Petani di dataran medium menilai kegiatan KUD dalam mendukung penjualan hasil pertanian dan pengadaan sarana produksi hanya sebesar 3,8%, sedangkan petani di dataran tinggi menilai kegiatan yang mendukung pengadaan sarana produksi sebesar 20,6%. Selain kelompok tani dan KUD, **lembaga non-pertanian** juga digunakan untuk media tukar menukar informasi pertanian dan pembinaan para petani seperti tercantum pada Tabel 7.

Tabel 6. Manfaat langsung kegiatan KUD bagi kegiatan usahatani

<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Dataran medium</i>	<i>Dataran tinggi</i>
	—— persen ——	
Penjualan hasil pertanian	3,8	0,0
Pengadaan sarana produksi	3,8	20,6
Arisan/simpan pinjam	0,0	14,7
Lainnya	92,3	64,7

Tabel 7. Lembaga non-pertanian sebagai media tukar-menukar informasi pertanian dan pembinaan para petani

<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Dataran medium</i>	<i>Dataran tinggi</i>
	—— persen ——	
Pengajian	47,6	47,1
Pertemuan PKK/RT/pertemuan kerukunan desa	52,4	52,9

Sumber informasi perkembangan teknologi pertanian

Sumber informasi perkembangan teknologi pertanian bagi petani di dataran medium dan petani di dataran tinggi yang utama sampai saat ini adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), tetangga dan pamong desa menduduki peringkat berikutnya seperti disajikan pada Tabel 8. Petani di dataran medium menyebutkan bahwa tetangga/famili merupakan sumber informasi ke dua setelah PPL, sedangkan pamong desa di dataran tinggi menduduki peringkat ke dua. Informasi dari radio/TV dan koran/majalah menduduki peringkat ke empat dan ke lima baik di dataran medium maupun di dataran tinggi.

Tabel 8. Sumber informasi perkembangan teknologi pertanian

Sumber informasi	Dataran medium	Dataran tinggi
Penyuluh/PPL (%)	30,48	32,34
Kepala Desa/ Pamong desa (%)	21,90	26,69
Tetangga/famili (%)	22,86	19,92
Radio/TV (%)	15,71	12,78
Koran/majalah/buku (%)	7,62	7,14
Lainnya (%)	1,43	1,13
N (Jumlah responden)	39	52

PEMBAHASAN

Karakteristik petani responden (Tabel 1) menunjukkan bahwa walaupun umur petani di dataran medium sedikit lebih tua dibandingkan dengan petani di dataran tinggi, dari segi pengalaman dalam berusahatani petani responden di dataran tinggi lebih lama (sekitar 22,3 tahun) dibanding dengan rata-rata pengalaman petani responden di dataran medium (20,25 tahun). Namun demikian tingkat pendidikan formal dan non formal di dataran medium lebih tinggi dibanding dengan di dataran tinggi. Kondisi ini yang menjadikan petani di dataran tinggi cenderung lebih pasif (Tabel 2), sejalan dengan yang diungkapkan Bagyo dan Rahmanto (1995) dan Purwani *et al.*, (1995). Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberanian untuk mengubah jenis usahatannya. Petani di dataran medium lebih berani (50%) dibandingkan dengan petani di dataran tinggi (39,4%). Kebutuhan keahlian untuk melaksanakan program pengembangan usaha agribisnis di dataran medium direspon relatif lebih tinggi dibandingkan di dataran tinggi (Tabel 3). Kondisi ini bukan berarti petani di dataran tinggi tidak lagi memerlukan keahlian dalam melakukan

program pengembangan usaha agribisnis. Pengalaman petani selama ini dan sarana angkutan yang ada di dataran tinggi menyebabkan persepsi petani terhadap kebutuhan keahlian dari beberapa jenis kegiatan relatif lebih rendah dibanding di dataran medium. Petani di dataran medium antusias untuk meningkatkan keahlian dari beberapa jenis kegiatan untuk pengembangan usaha agribisnis.

Fenomena ini berimplikasi pada sikap petani di dataran medium yang lebih responsif terhadap adanya suatu inovasi teknologi baik yang dijumpai di lapangan maupun dari sumber informasi seperti media elektronik dan media cetak. Hal ini diduga selain disebabkan akses ke daerah lain lebih lancar juga terkait dengan tingkat pendidikan di dataran medium yang rata-rata lebih tinggi. Keadaan ini sejalan dengan yang ditemukan Bagyo dan Rahmanto (1995) bahwa petani yang tingkat pendidikan relatif tinggi cenderung lebih cepat mempertimbangkan dan menerapkan teknologi yang diperkenalkan. Purwani *et al.*, (1995) menyebutkan semakin tinggi pendidikan formal petani cenderung semakin baik dalam menyikapi inovasi teknologi.

Pola pengambilan keputusan antara petani

di dataran medium dan di dataran tinggi dalam pemenuhan kebutuhan modal relatif sama (Tabel 4). Bila dilihat persentase petani yang mengambil kredit untuk modal usahatannya, meminjam dari Bank merupakan pilihan pertama bagi petani baik di dataran tinggi maupun di dataran medium. Alternatif pilihan meminjam modal adalah pada lembaga non formal misalnya ke tetangga, saudara, ataupun kelompok tani. Petani di dataran tinggi persentase meminjam ke kelompok ini cenderung lebih tinggi dibanding dengan di dataran medium. Keadaan ini merupakan cerminan petani di dataran tinggi, dimana hubungan antar tetangga relatif erat dan saling ketergantungan, serta ditunjang akses antar wilayah relatif terbatas. Kondisi di atas menunjukkan bahwa akses petani terhadap modal yang disediakan lembaga keuangan formal masih rendah, dapat dikatakan satu-satunya sumber permodalan usahatani hanya dari Kredit Usaha Tani (KUT). Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan keahlian cara mendapatkan kredit cukup besar (Tabel 3).

Fenomena pemanfaatan sumber kredit informal menunjukkan potensi pasar modal di pedesaan sesungguhnya cukup besar, hanya belum dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan formal dengan baik. Menurut Martowijoyo (2002) di pedesaan secara tradisional telah berkembang lembaga-lembaga keuangan "lokal" yang melayani kebutuhan mereka berazaskan swadaya dan pendekatan pasar. Lembaga keuangan pedesaan (LKP) atau lembaga keuangan mikro (LKM) ini antara lain adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM), Badan Kredit Desa (BKD), dan Badan Kredit Kecamatan (BKK). Lembaga Keuangan Mikro ini perlu dibina dan ditangani secara baik oleh pemerintah karena sudah berakar dan melembaga di masyarakat pedesaan.

Menurut Martowijoyo (2002), LKP selain kurang memperoleh perhatian, juga terkena dampak kebijakan yang memberikan prioritas kepada program-program kredit murah bersubsidi dan pendirian LKP baru versi beberapa departemen, maupun kebijakan deregulasi perbankan No.7/1992 yang kemudian diubah dengan UU Perbankan No. 10/1998. Kebijakan tersebut secara tidak sengaja telah menurunkan kinerja kapital sosial LKM di pedesaan.

Kegiatan kelompok tani yang menonjol adalah kegiatan penyuluhan pertanian, baik dikemas dalam pertemuan arisan warga maupun yang telah tersusun secara periodik seperti setiap selapanan. Kegiatan gotong royong/*sambatan* dalam kegiatan usahatani menempati urutan ke dua yang diminati, karena diyakini berdampak langsung. Kegiatan pengadaan sarana produksi, meskipun sangat berkaitan dengan kegiatan usahatani, namun petani di dataran medium maupun di dataran tinggi tidak merespon karena dianggap tidak berdampak langsung terhadap kegiatan usahatani (Tabel 5).

Petani di dataran medium kurang merasakan manfaat kegiatan yang dilakukan KUD selama ini, karena tidak berdampak langsung terhadap kegiatan usahatani, namun demikian persentase penilaian yang diberikan petani di dataran tinggi tidak sama. Penilaian terhadap kegiatan pengadaan sarana produksi menduduki peringkat ke dua (20,6%) oleh petani dataran tinggi, sedangkan petani di dataran medium hanya memberikan 3,8% kegiatan ini berdampak pada kegiatan usahatani (Tabel 6). Hal ini diduga karena petani di dataran medium yakin tanpa adanya kegiatan pengadaan sarana produksi oleh KUD, dapat dilakukan sendiri karena akses ke luar daerahnya relatif lancar. Meskipun petani di dataran medium

menilai kegiatan KUD kurang memberikan dampak langsung terhadap kegiatan usahatani, namun merasa perlu upaya peningkatan kegiatan KUD dalam membantu meningkatkan usahatani petani.

Jenis kegiatan yang dapat digunakan sebagai media tukar menukar informasi antara petani di dataran medium dan di dataran tinggi cenderung sama yakni pengajian dan pertemuan warga baik di tingkat Rukun Tangga (RT) maupun desa (Tabel 7). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengajian maupun pertemuan masih diperlukan petani, serta dapat dimanfaatkan pihak terkait dalam rangka penyampaian suatu informasi.

Petani di dataran medium maupun di dataran tinggi sangat terbatas dalam memperoleh informasi perkembangan teknologi pertanian, sehingga PPL merupakan salah satu sumber informasi yang sangat diandalkan oleh petani (Tabel 8). Selain PPL, kepala desa/pamong desa ikut berperan sebagai sumber informasi perkembangan teknologi pertanian. Kondisi ini sejalan dengan peran mereka sebagai pemimpin yang dipilih untuk menjadi panutan. Sumber informasi seringkali diperoleh dari tetangga/famili, hal ini sebagai cerminan bahwa hubungan kekerabatan petani di pedesaan masih kental dan masih mau berbagi informasi tidak mementingkan diri sendiri. Perkiraan lemahnya arus informasi karena petani kurang berkesempatan membaca koran/majalah/buku dan sangat terbatas mendengarkan berita dari radio maupun TV, sehingga kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang terkini serta belum memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam membantu petani misalnya subsidi pupuk. Dalam rangka mendiseminasikan hasil kajian, berbagai media cetak yang sering diterbitkan perlu ditelusuri

kelemahan/kekurangannya sehingga dapat diterima petani sebagai salah satu sumber informasi.

SIMPULAN

Pendidikan formal dan non formal petani gurem di dataran medium rata-rata lebih tinggi dan lebih responsif terhadap inovasi teknologi pertanian bila dibandingkan dengan petani di dataran tinggi. Adanya keterbatasan informasi bagi petani, beberapa inovasi teknologi pertanian terkini dan kebijakan pemerintah seperti subsidi harga pupuk belum dirasakan oleh petani baik yang tinggal di dataran medium maupun di dataran tinggi. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat berperan sebagai salah satu sumber informasi maupun dalam kegiatan kelompok tani. Untuk itu reposisi tugas pokok dan fungsi serta struktur kelembagaan penyuluhan di pemerintah kabupaten/kota perlu dipertimbangkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagyo, A. S., dan B. Rahmanto. 1995.* Faktor Kelembagaan dan Sosial Ekonomi dalam Adopsi Sabit Gerigi dalam Usahatani Padi. Dalam: Risalah Seminar Hasil Penelitian Sistem Usahatani dan Sosial Ekonomi Berbasis Tanaman Pangan, Bogor 4-5 Oktober 1994. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. Hlm 418-424
- BPS. 2004a.* *Sensus Pertanian 2003.* Angka Nasional Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS. 2004b.* Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- BPS. 2004c.* Pertumbuhan Rumah Tangga Pertanian di Indonesia (Angka Sangat

- Sementara Hasil Sensus Pertanian 2003/ST03). Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Martowijoyo, S. 2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. I - No. 5 - Juli 2002. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_5.htm*
- Mubyarto. 2002. Menuju Pertanian Berkelanjutan Melalui Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila. Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.*
- Oxfam. 2000. Agricultural Trade and the Livelihoods of Small Farmers. Discussion paper for DFID. Oxfam GB, Policy Department, March 2000.*
- Purwani, E. Y., B.A. Santosa, dan G. Gianjar. 1995. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan konsumen terhadap Susu Kedelai. Dalam: Risalah Seminar Hasil Penelitian Sistem Usahatani dan Sosial Ekonomi Berbasis Tanaman Pangan, Bogor 4-5 Oktober 1994. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. Hlm 101-109.*
- Suara Merdeka. 2005. Jateng Rawan Busung Lapar. Suara Merdeka, Kamis, 2 Juni 2005.*
- Sudana, W. Hendiarto, Roesmiyanto dan Pratomo, AG 2002. Karakteristik Rumah tangga petani di lima agroekosistem wilayah pengembangan SUT di Jawa Timur. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Volume 5, No. 2, Juli 2002. hlm 83-96.*
- Suhendar, E. 1995. Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat. Seri Pengkajian Akatiga. Akatiga, 90 p.*
- Suryana, A. 2003. Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan. Dalam: Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. Edisi 2003/2004. BPFE, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.*